

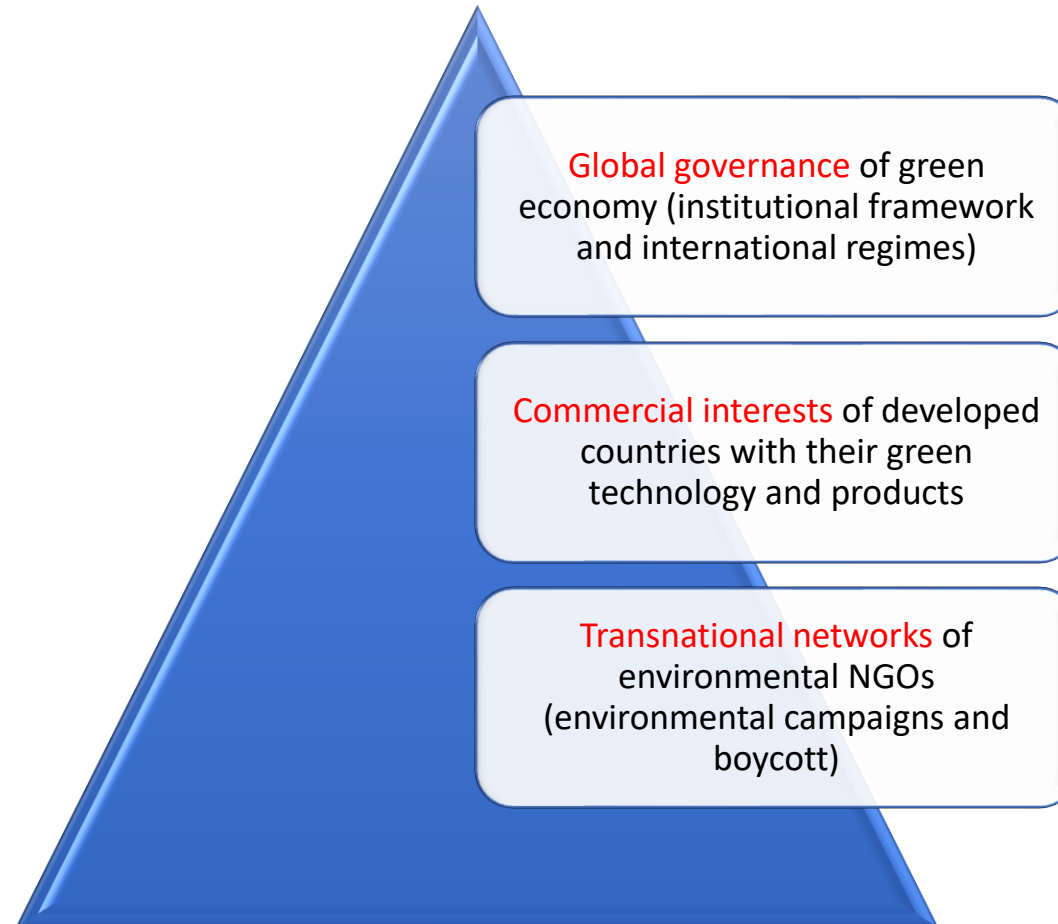
Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri RI dalam Rangka Green Economy yang mendukung Program Pembangunan Nasional

by Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D

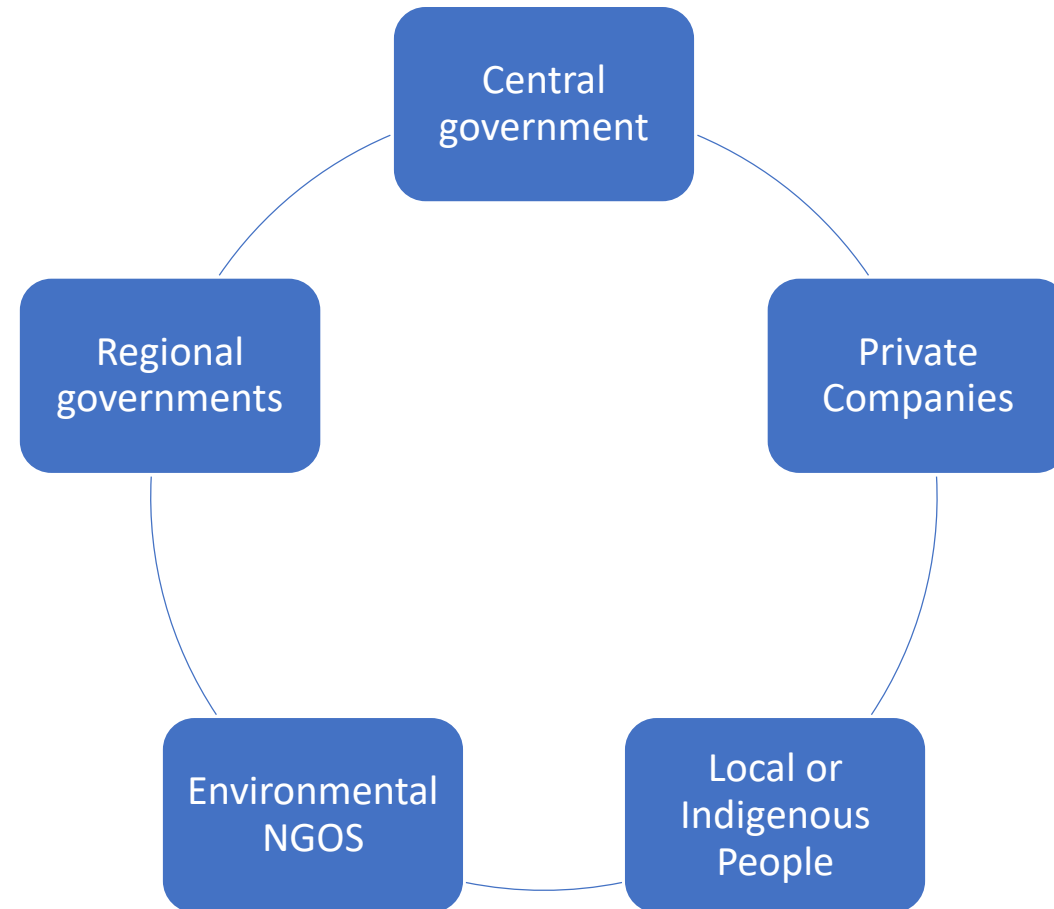
What is green economy diplomacy: a view from an emerging market

- Instrumen kebijakan luar negeri untuk melindungi dan memajukan kepentingan pembangunan ekonomi Indonesia yang masih mengandalkan SDA sebagai komoditas ekspor utama (*palm oil*) tetapi pada saat yang sama dapat meyakinkan dunia bahwa Indonesia *committed* terhadap prinsip-prinsip *green economy* sehingga Indonesia tidak dirugikan oleh *international environmental regimes* terkait *green economy* maupun oleh kampanye *green products* baik oleh negara maju maupun NGOs internasional.

External challenges of RI's environmental diplomacy on green economy



Major Policy Stakeholders of Green Economy Diplomacy



Apa itu *green economy*?

- UNEP mendefinisikan *green economy* sebagai ... *one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities.*
- Ciri-ciri green economy:
 - *Low carbon*
 - *Resource efficient*
 - *Socially inclusive*
- Tetapi dalam praktik hubungan internasional, green economy juga memiliki dimensi politik yaitu pertarungan kepentingan aktor-aktor internasional untuk meningkatkan absolute maupun relative gain (*the international politics of green economy*).

Orientasi utama *green economy*:

- Peningkatan **pendapatan** dan **lapangan kerja** melalui **public and private investment** yang tujuannya mengurangi emisi gas karbon dan polusi, meningkatkan **efisiensi penggunaan energi dan sumberdaya alam**, serta mencegah hilangnya **keanekaragaman hayati** dan jasa **ekosistem**.
- Dalam pelaksanaan green economy selalu ada persoalan ***distribution of cost and benefit*** (who gets what and how, meminjam kata-kata Harold Lasswell).

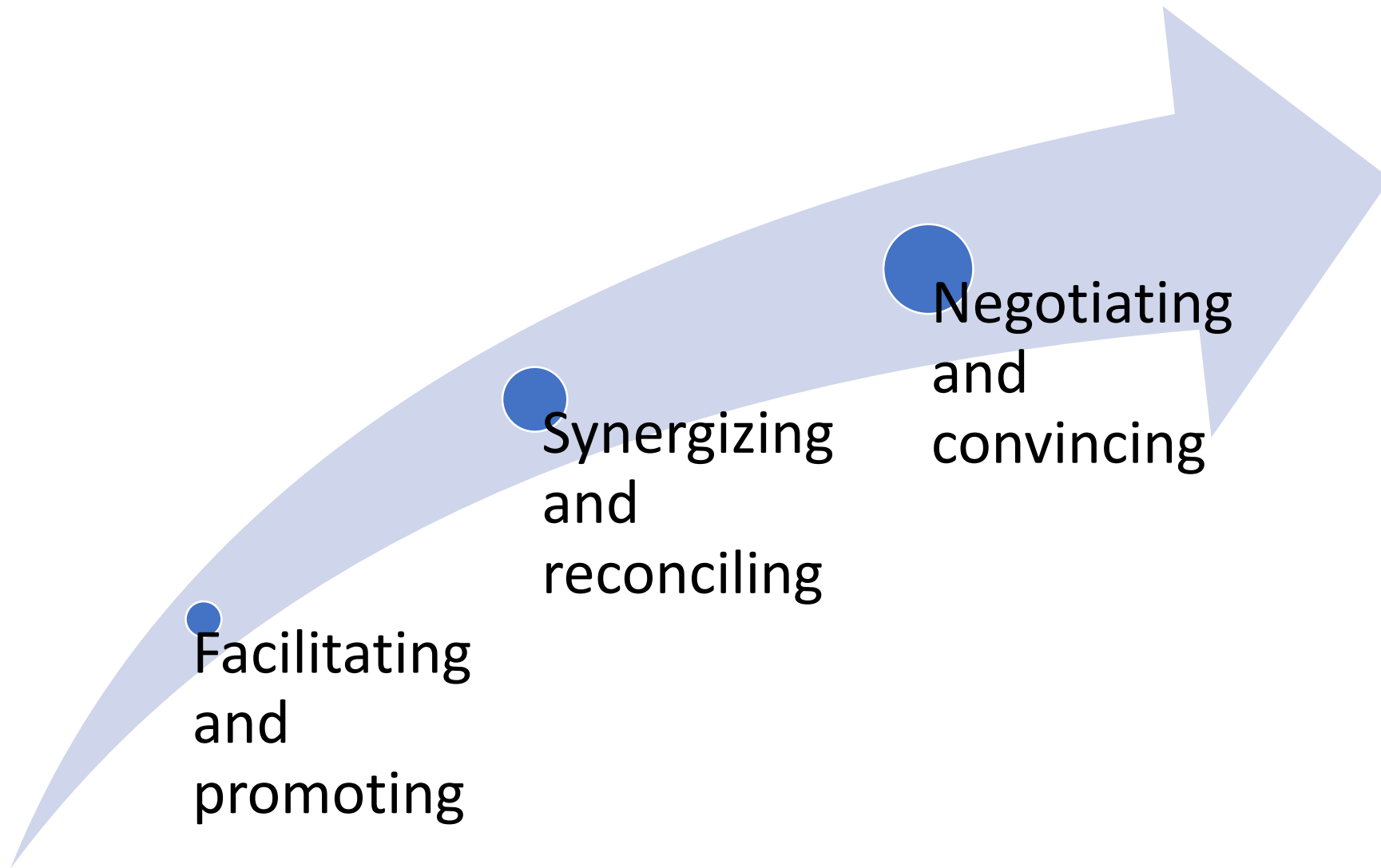
- Berdasarkan definisi di atas dan mempertimbangkan kondisi pembangunan Indonesia, maka esensi diplomasi *green economy* adalah: *how to convince the international community that Indonesia is capable and willing to reconcile or synergize the following potentially conflicting development goals or objectives:*
 - Creating job opportunities
 - Promoting economic growth which is very much resource-based.
 - Increasing public and private investment based on the parameters of green economy
 - Enhancing energy and resource efficiency
 - Preventing loss of biodiversity and ecosystem services

- *UNEP defines a green economy as one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities.*
- *In its simplest expression, a green economy can be thought of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive.*
- *In a green economy, growth in income and employment should be driven by public and private investments that reduce carbon emissions and pollution,, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services.*

- *These investments need to be catalysed and supported by targeted public expenditure, policy reforms and regulation changes.*
- *The development path should maintain, enhance and, where necessary, rebuild natural capital as a critical economic asset and as a source of public benefits, especially for poor people whose livelihoods and security depend on nature.*

Intermestic nature of green economy diplomacy

- Seperti kebanyakan isu **intermestic** lainnya, green economy secara substansi lebih merupakan kompetensi atau domain kelembagaan kementerian yang lain tetapi Kementerian Luar Negeri dapat memfasilitasi pencapaiannya.
- Karena itu idealnya green economy diplomacy merupakan **total diplomacy** berbasis kinerja Indonesia sebagai **an emerging market** yang **committed** untuk mematuhi **international regimes** yang berlaku tanpa mengorbankan kewajiban konstitusional sesuai pasal 33 UUD 1945.
- Karena itu peran Kementerian Luar Negeri bisa digambarkan sebagai berikut.



Kepentingan nasional dan tujuan kebijakan luar negeri dalam green economy diplomacy

- Pembangunan ekonomi yang masih mengandalkan komoditas berbasis SDA sebagai andalan ekspor
- Memperjuangkan agar komoditas strategis Indonesia yang berbasis SDA tidak dirugikan oleh ketentuan tentang *green products* dalam perdagangan internasional (misalnya, memperjuangkan diterimanya crude palm oil dalam green goods list dalam forum APEC sehingga dapat potongan tarif 5%).
- Memperjuangkan investasi asing dalam bidang *renewable energy* di Indonesia untuk pembukaan lapangan kerja dan alih *green technology*.
- Meningkatkan kerjasama dengan BRICS yang pada dasarnya juga berkepentingan dengan perlindungan komoditas berbasis SDA (khususnya Brazil dan Rusia) untuk peningkatan bargaining position dalam diplomasi internasional.

- Meningkatkan partisipasi dan peran Indonesia dalam berbagai fora internasional dalam promosi *green economy*.
- Meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia menjalankan komitmennya dalam penurunan emisi gas seperti yang sudah pernah dijanjikan oleh Presiden SBY dalam berbagai fora internasional.
- Memobilisasi dana dari berbagai organisasi internasional yang dimaksudkan sebagai insentif untuk implementasi *green economy* dan *green technology* (dikaitkan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 61/2011).

Meniru *best practices* di negara lain?

- Gunakan prinsip **apple to apple comparison**. Kita perlu belajar dari negara maju, tetapi yang lebih penting adalah belajar dari **emerging markets** lainnya (BRICS) khususnya Brazil yang relatif sama kondisi pembangunan ekonominya dengan kita di mana ada dilema antara keniscayaan pertumbuhan ekonomi berbasis SDA dan perlunya menerapkan prinsip-prinsip green economy.
- Kerjasama yang erat dengan emerging markets bisa meningkatkan bargaining position Indonesia vis a vis **commercial interests** negara maju yang cenderung mendominasi atau mendikte international regimes terkait isu green economy.

Position of Developed Countries (USA, Japan, EU, OECD)

Sources of Bargaining Power	Characteristic of Social-Economic Development	Preference for IFSD and green economy
Huge financial power	High-mass consumption	UN specialized agency
Domination in Bretton-Woods institutions (WB, IMF, GATT)	Uncompromised modern life-style	Promotion of green economy
Strong solidarity among G-7	Technology & knowledge based economy	WEO (World Environmental Org.)
Control of green technology	High HDI (Human Development Index)	UNEO (UN Environmental Org.)
Headquarters of global MNCs	Ready for green economy	
Domination regarding the use of GEF (Global Environmental Facility)	Huge investment in green technology	

Position of India & China

Sources of Bargaining Power	Characteristic of Social-Economic Development	Preference for IFSD and green economy
Huge domestic market BRICS – emerging markets	Point of no return in industrializing their economies	Harmony and integration of 3 pillars
Huge foreign reserves	Environment may not be a first priority	Against using environment to block trade of national resources
Demand-creating power	Seeking to challenge the economic domination of the West	Incremental change in IFSD
Leading global economy recovery	Huge demand of natural resources (energy) from other developing countries	
Respected by other developing countries & reckoned by western developed states	Hosting huge investment from developed countries	
Ownership of global MNCs & aggressive acquisition of global equities	Seeking to control green technology (China's solar panel)	

Position of Indonesia

Sources of Bargaining Power	Characteristic of Social-Economic Development	Preference for IFSD and green economy
Diplomatic standing (ASEAN, GNB, OIC, G-77, G-20, EAS)	Resource-based growth, with priority: Poverty eradication, employment creation, highly indebted	The primacy of UN system
New democracy	Less or no control of green technology	Integration of 3 pillars (economic, environmental and social)
Huge domestic market	Low HDI (Human Development Index)	Umbrella organization for 3 pillars with the UN system (similar to Brazil's position)
High economic growth	Aspiring to be a newly industrialized economy – emerging market	Reject domination by major powers with financial coverage.
	Environment is second priority	Developing nations's full rights to become developed

Sources of Bargaining Power	Characteristic of Social-Economic Development	Preference for IFSD
	In need of capacity building	Respect the use of environment standards as barriers in exporting
	Less powerful State's Ministry of Environment	
	Sustainable development very important for long-term perspective, yet relatively neglected	
	In need of foreign investment for exploitation of natural resources	

Concluding remarks

- Pemahaman tentang hakekat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berbasis SDA serta pentingnya untuk patuh pada **international regimes** tentang green economy diperlukan untuk perumusan kebijakan luar negeri dan diplomasi dalam isu ini.
- Green economy termasuk **isu intermestic** di mana Kementerian Luar Negeri dituntut untuk menjembatani kepentingan dalam negeri dan tuntutan internasional.
- Ada potensi konflik kepentingan antar berbagai kepentingan dalam implementasi green economy yang harus diselaraskan agar tidak mengganggu **total diplomacy** dalam isu ini.

- Dibutuhkan grand design untuk green economy diplomacy yang didukung oleh **kemauan politik** yang kuat pada top executive (presiden) mengingat implikasinya yang luas dan jangka panjang.
- Ketertinggalan Indonesia di bidang green technology harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan menarik **investasi asing** khususnya untuk **renewable energy**.
- Indonesia perlu mengidentifikasi **negara-negara dengan hakekat pembangunan ekonomi yang sama** (resource-based) untuk kerjasama dan peningkatan bargaining position di fora internasional.
- Indonesia perlu mencermati **commercial interests** di balik kekuatan-kekuatan global yang mendorong diskursus green economy baik itu negara maju maupun MNCs (**the politics of green economy**)

- Para diplomat Indonesia perlu **pro-aktif** menjelaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalankan green economy dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan best practices yang ada tanpa menunggu ada negative campaign baik oleh negara asing maupun environmental NGOs.
- Diperlukan identifikasi **key performance areas** (KPA) serta indikator keberhasilan diplomasi green economy sebagai dasar evaluasi tahunan dan kemudahan dalam mengupayakan sinergi antar instansi pemerintah maupun swasta.
- Pada akhirnya, green economy diplomacy adalah **kinerja sistem ekonomi secara menyeluruh** (baik pemerintah maupun swasta) dan bukan kerja terpisah dari hanya satu instansi.

KPA dan Indikator Keberhasilan Green Economy Diplomacy (dijabarkan dari CIR)

KPA	Indikator Keberhasilan
Pembangunan ekonomi	Peningkatan ekspor CPO yg ecofriendly
	Peningkatan investasi green products and technology
	Peningkatan R and D green products and technology
Diplomacy	Diterimanya usul Indonesia dlm fora internasional green economy
	Meningkatnya kerjasama bilateral, regional dan multilateral mendukung green economy di Indonesia
Clean Air	Pengurangan emisi gas

Referensi:

- Rizal Sukma (1995). “The Evolution of Indonesia’s Foreign Policy: An Indonesian View”. *Asian Survey*, Volume 35 No. 3 (March 1995). pp. 304 - 315.
- Suryadinata, L. (1996). *Indonesia’s foreign policy under Soeharto, aspiring international leadership*. Singapore: Times Academic Press.